

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A. Gede Oka Parwata, dkk, *Buku Ajar Memahami Hukum dan Kebudayaan*, (Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2016)
- Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Alfian, *Persepsi Politik tentang Kebudayaan*, (Jakarta: Gramedia, 1984)
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001)
- Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009)
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003)
- B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005)
- C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Gede Marhaendra Wija Atmaja & Anak Agung Istri Atu Dewi, “Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali”, dalam *Hukum Adat dan Desa Adat di Bali*, (Denpasar: Udayana University Press, 2021)

- H. Mashudi & Moch. Chidir Ali, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979)
- I Ketut Artadi, *Hukum dalam Perspektif Kebudayaan*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006)
- I Wayan Arka, *Desa Adat sebagai Subyek Hukum Perjanjian*, (Denpasar: Udayana University Press, 2016).
- J.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie van het Nederlandse Recht)*, (Jakarta: Noordhof Kolff, 1985)
- Johannes Gunawan & Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur, 2021)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983)

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Mataram, 2016)
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007)
- Philipus M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soerjono Soekanto & Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1982)
- _____ & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2005)
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2003)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985)
- Sulistyo Irianto & Shidartha, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013)
- Surpha, *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, (Denpasar: Penerbit Pustaka Bali Post, 2004)

Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)

Wayan P. Windia & I Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, (Denpasar: Swasta Nulus, 2016)

Jurnal

Hananto Prasetyo, “Pembaharuan Hukum Perjanjian *Sportentertainment* Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, No. 1 Januari 2017

I Ketut Sudantra, “Formalisasi Forum Komunikasi Antar Desa Adat dalam Konteks Penyelesaian Persoalan-Persoalan Hukum yang Dihadapi Desa Adat”, *Kertha Patrika* XXIV, No. 72, 1999

Imma Indra Dewi W., “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 3 Oktober 2008

Satjipto Rahardjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”, *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10, 1993.

Hasil Penelitian

I Kadek Yudhi Pramadita, “Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pariwisata Tanah Lot Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Dengan Desa Pakraman Beraban Dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum”, Tesis, Universitas Brawijaya, 2017.

Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Adat, “*Kedudukan Desa Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Setelah Berlakunya UU No.2 Tahun 1999 di Kabupaten Gianyar.*”, Laporan Penelitian, (Denpasar: BAPPEDA)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisata (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4966))

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pekraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Provinsi Bali Nomor 4)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 28)

Perjanjian Kerja Sama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dengan Desa Adat Manukaya Tampaksiring Nomor: 9616/DIPARDA/2018 tentang Pengelolaan dan Pembagian Pendapatan Karcis Masuk di Daya Tarik Wisata Tirta Empul Tampaksiring Kabupaten Gianyar

Adendum Kesatu Perjanjian Kerja Sama Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dengan Desa Adat Manukaya Let Tampaksiring Nomor 800/416/DIPARDA tentang Pengelolaan dan Pembagian Pendapatan Karcis Masuk di Daya Tarik Wisata Tirta Empul Tampaksiring Kabupaten Gianyar

Website/Internet

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (Indonesia: Kemdikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>

Kurnia Warman “Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat”, diakses melalui https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284

Nusa Bali, “RAB Rp. 4,5 Miliar, Undang Presiden Jokowi”, melalui <https://www.nusabali.com/berita/58873/rab-rp-45-miliar-undang-presiden-jokowi>, diakses pada 4 November 2022

Saufa Ata Taqiyya, “Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian”, [Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com) diakses pada 16 Juli 2022

Wawancara

Hasil wawancara dengan Made Mawi Arnata, Kepala Desa Adat Manukaya Let, via *Whatsapp call*, Karawaci – Bali, Tanggal 21 Oktober 2022, pukul 16.03 WIB dan 4 November 2022, pukul 16.22 WIB.

Hasil wawancara dengan I Gusti Ngurah Susatia Putera, S.S., M.Si., adalah Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Bali, Tanggal 6 Juli 2022 pukul 09.30 WITA

Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Ir. I Wayan P. Windia, S.H., M.Si., pengajar hukum adat, Karawaci – Bali, Tanggal 9 November 2022 pukul 09.27 WIB

